JASc Journal Of Agribusiness Sciences e-ISSN :2614-6037

sinta S4 Science and Technology Index

October 2026 Volume 10 No. 2

Persepsi Dan Kesediaan Membayar (*Willingness To Pay*) Petani Padi Terhadap Pupuk Bersubsidi Di Kota Bengkulu

Juli Wenti Evionita[1)*], Satria Putra Utama[2)], Melani Anisa Fitri[3)], Istriningsih[4)]

[123]*Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu*

[4]*Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*

Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38122

email* : *juliwenti@gmail.com*

Abstrak

Program pupuk bersubsidi di Kota Bengkulu masih menghadapi masalah kelangkaan, distribusi tidak merata, peredaran pupuk ilegal, dan harga di atas Harga Eceran Tertinggi HET yang memengaruhi persepsi serta *Willingness to Pay* (WTP) petani. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi petani padi, mengukur WTP, dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilakukan pada November–Desember 2025 di Kecamatan Singaran Pati dan Muara Bangkahulu dengan 83 responden yang dipilih secara *simple random sampling*. Persepsi dianalisis menggunakan skala *Likert*, WTP dengan metode *Contingent Valuation Method* (CVM) *payment card*, dan faktor yang memengaruhinya menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan persepsi petani terhadap kualitas, ketersediaan, distribusi, dan kewajaran harga tergolong baik. Rata-rata WTP pupuk Urea sebesar Rp2.732/kg (21,4%) dan NPK Rp2.778/kg (21%), lebih tinggi dari HET. variabel yang berpengaruh signifikan terhadap WTP meliputi persepsi, luas lahan, pendapatan, dan status kepemilikan lahan, sedangkan lama bertani dan akses pupuk tidak signifikan.

Kata kunci: CVM, Persepsi Petani, Pupuk Bersubsidi, Regresi Linear Berganda, WTP

Perception And Willingness To Pay Of Rice Farmers For Subsidized Fertilizer In Bengkulu City

Abstract

The subsidized fertilizer program in Bengkulu City still faces problems of scarcity, uneven distribution, illegal distribution of fertilizers, and prices above the Highest Retail Price (HET), which influence farmers' perceptions and Willingness to Pay (WTP). This study aims to analyze rice farmers' perceptions, measure WTP, and identify influencing factors. The study was conducted from November–December 2025 in Singaran Pati and Muara Bangkahulu Districts with 83 respondents selected by simple random sampling. Perceptions were analyzed using a Likert scale, WTP using the Contingent Valuation Method (CVM) payment card method, and influencing factors using multiple linear regression. The results show that farmers' perceptions of quality, availability, distribution, and price fairness are relatively good. The average WTP for Urea fertilizer is Rp2,732/kg (21.4%) and NPK is Rp2,778/kg (21%), higher than the HET. Variables that significantly influence WTP include perception, land area, income, and land ownership status, while length of farming and access to fertilizer are not significant.

Keywords: *CVM, farmer perception, multiple linear regression, subsidized fertilizer, WTP*

PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas pertanian strategis di Indonesia yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta menjadi sumber penghidupan bagi banyak petani. Untuk mendukung keberlanjutan produksi dan mengurangi beban biaya petani, pemerintah menetapkan kebijakan subsidi sarana produksi, khususnya pupuk (Rozci, 2024). Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah melalui

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

program subsidi pupuk tersebut untuk menekan biaya input produksi, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, dan memperkuat ketahanan pangan nasional (Jamil et al., 2022). Pemerintah menerapkan sistem distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup dengan menggunakan dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar utama penyaluran. Penyusunan RDKK bertujuan mempermudah perencanaan volume dan biaya kebutuhan pupuk, serta didukung penerapan Kartu Tani guna memastikan distribusi sesuai prinsip 6T, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, mutu, dan harga (Halim & Adab, 2023).

Pemerintah mengendalikan harga pupuk bersubsidi melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai instrumen kebijakan pertanian. Berdasarkan Kepmentan Nomor 644 Tahun 2024, pemerintah menaikkan HET pupuk bersubsidi sebesar Rp300–Rp450 per kilogram yang berlaku mulai 1 Januari 2025, menjadi penyesuaian harga pertama setelah hampir sepuluh tahun, dengan total alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton senilai Rp46,8 triliun untuk tahun anggaran 2025 (Kementerian Pertanian, 2024). Besaran ini lebih rendah dibandingkan anggaran subsidi pupuk tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp50,68 triliun, seiring berkurangnya selisih subsidi yang ditanggung akibat kenaikan HET tersebut (Aberth, 2024). Kebijakan kenaikan HET ini berpotensi menambah beban biaya produksi petani, sehingga informasi mengenai persepsi dan WTP petani menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi apakah HET yang berlaku telah mencerminkan kemampuan ekonomi petani di Kota Bengkulu. Rincian perubahan HET tiap jenis pupuk bersubsidi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan HET Tahun 2024-2025

Jenis pupuk	HET 2016-2024/Kg	HET 2025/Kg	Kenaikan HET/Kg
Urea	Rp 1.800	Rp 2.250	Rp 450
ZA	Rp 1.400	Rp 1.700	Rp 300
SP-36	Rp 2.000	Rp 2.400	Rp 400
NPK	Rp 2.300	Rp 2.300	-
NPK Formula	Rp 3.300	Rp 3.300	-
Pupuk Organik Granul	Rp 500	Rp 800	Rp 300

Sumber: *Kepmentan Nomor 644, 2024*

Penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Studi di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi mengungkapkan bahwa anggaran subsidi belum sebanding dengan kualitas implementasinya, karena masih terjadi penyimpangan seperti penyaluran di luar wilayah, kelangkaan stok, penyelundupan, serta penjualan melebihi HET yang merugikan petani (Adiraputra et al., 2021). Selain itu (Ombudsman RI, 2024) menemukan banyak petani belum memahami besaran HET dan mekanisme penetapannya akibat kurang optimalnya sosialisasi kebijakan.

Kota Bengkulu memegang peranan penting dalam menopang produksi padi di Provinsi Bengkulu, namun permasalahan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi masih menjadi tantangan nyata di wilayah ini. Data (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025) mencatat adanya penurunan produksi padi yang cukup tajam, dari 4.808 ton dengan luas panen 1.098 hektare pada tahun 2023 menjadi 3.694 ton dengan luas panen 755 hektare pada tahun 2024. Kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi kendala utama yang dirasakan

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

petani, khususnya pada periode menjelang dan selama musim tanam berlangsung. Di sisi lain, sebagian petani memilih membeli pupuk melalui jalur tidak resmi dengan harga yang jauh melampaui HET yang ditetapkan pemerintah, kondisi ini pada akhirnya mendorong kenaikan biaya produksi sekaligus menekan pendapatan petani (Firmansyah, 2025). Permasalahan di lapangan semakin terlihat seiring dengan belum optimalnya distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Hambatan yang kerap dijumpai meliputi keterbatasan dana kelompok tani untuk menebus pupuk, keterlambatan pasokan ke kios resmi, serta ketidaksesuaian antara jumlah pupuk yang diterima dengan kebutuhan yang tertuang dalam RDKK, sehingga mendorong petani mencari alternatif pasokan di luar sistem distribusi resmi (Ombudsman RI, 2024). Kondisi ini diperparah dengan maraknya peredaran pupuk ilegal dan palsu yang tidak berlabel dan tidak memiliki izin edar. Berbagai permasalahan ini mengakibatkan harga pupuk yang dibayar petani di lapangan kerap melampaui HET, yang pada akhirnya memperberat biaya produksi dan berdampak pada penurunan produktivitas serta kesejahteraan petani (Bengkulu Today, 2025)

Dalam konteks tersebut, persepsi petani terhadap program pupuk bersubsidi menjadi aspek penting karena di lapangan program ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dirasakan optimal. Informasi WTP menjadi krusial untuk mengevaluasi apakah HET saat ini telah mencerminkan kondisi ekonomi petani, agar kebijakan penyesuaian harga tidak memperburuk beban produksi dan menekan produktivitas padi di Kota Bengkulu. Berdasarkan permasalahan di atas, tiga tujuan dalam penelitian ini: (1) menganalisis persepsi petani padi terhadap pupuk bersubsidi di Kota Bengkulu; (2) menganalisis nilai Willingness to Pay (WTP) petani padi di Kota Bengkulu dalam membayar pupuk bersubsidi; dan (3) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan petani padi di Kota Bengkulu dalam membayar pupuk bersubsidi.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan pada November–Desember 2025 di Kecamatan Singaran Pati dan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive* pemilihan secara sengaja, karena wilayah tersebut memiliki jumlah kelompok tani padi yang memadai untuk pengumpulan data. Populasi mencakup petani padi yang terdaftar dalam RDKK dan memiliki Kartu Tani di kedua kecamatan tersebut sebanyak 490 orang. Sampel penelitian berjumlah 83 petani. Teknik penentuan sampel menggunakan *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. Penetapan jumlah sampel dilakukan dengan rumus *Slovin* pada tingkat signifikansi 10%.

$$\boldsymbol{n = \frac{N}{1 + N\, e^2}}$$

Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah Populasi
e = Standar Error 10% atau 0,1

Agar distribusi sampel sesuai dengan jumlah populasi di tiap Kelurahan, maka digunakan rumus alokasi proporsional:

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

$$ni = \frac{Ni}{N} x\, n$$

Keterangan:

ni = Jumlah sampel di Kelurahan
Ni = Jumlah populasi di Kelurahan
N = Jumlah populasi total
n = Jumlah sampel total

Jumlah sampel tiap kecamatan ditentukan dengan teknik alokasi proporsional, yaitu disesuaikan dengan proporsi jumlah petani di masing-masing wilayah terhadap total populasi. Karena populasi di Kecamatan Singaran Pati lebih besar, jumlah sampelnya juga lebih banyak. Dari total 83 sampel, diperoleh 50 responden di Kecamatan Singaran Pati dan 33 responden di Kecamatan Muara Bangkahulu. Teknik ini digunakan agar keterwakilan sampel tetap seimbang (Sugiyono, 2016)

Analisis Data

Analisis Persepsi Petani Padi Terhadap Pupuk Bersubsidi

Persepsi petani terhadap pupuk bersubsidi menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan skala *Likert*. Setiap pernyataan disusun berdasarkan variabel penelitian diberi skor antara 1 hingga 5, skor yang lebih tinggi mencerminkan persepsi yang semakin positif terhadap indikator yang diukur, sedangkan skor yang lebih rendah menunjukkan persepsi yang kurang positif. Kriteria penilaian disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Skala Pengukuran *Likert*

Kriteria	Skor Penilaian
▪ Sangat Setuju (SS)	5
▪ Setuju (S)	4
▪ Ragu-Ragu (R)	3
▪ Tidak Setuju (TS)	2
▪ Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: *Sugiyono, 2016*

Hasil perhitungan data yang telah dilakukan akan dikelompokkan ke dalam interval kelas pada Tabel 3 kategori penilaian guna mempermudah proses interpretasi dan analisis.

Tabel 3. Kategori Penilaian

Indeks Skor	Kategori
4,20-5,00	Sangat baik
3,40-4,19	Baik
2,60-3,39	Kurang baik
1,80-2,59	Buruk
1,00-1,79	Sangat buruk

Sumber: *Sugiyono, 2016*

Analisis Kesediaan Membayar Petani Terhadap Pupuk Bersubsidi

Penelitian ini menerapkan *Contingent Valuation Method* (CVM) untuk menganalisis kesediaan petani membayar pupuk bersubsidi sebagai metode survei ekonomi untuk mengukur *Willingness to Pay* (WTP). Mengingat harga pupuk bersubsidi telah ditentukan oleh pemerintah, diperlukan informasi mengenai

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

tingkat harga yang sesuai dengan kemampuan dan kesediaan bayar petani. Tahapan metode CVM yaitu:

Menyusun Pasar Hipotesis

Pasar hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan hasil studi literatur, meliputi kelangkaan, keterlambatan distribusi, penjualan di atas HET, serta peredaran pupuk ilegal dan palsu di tingkat petani. Permasalahan tersebut berdampak pada penurunan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kecamatan Singaran Pati dan Muara Bangkahulu. Oleh karena itu, penelitian ini merancang skenario pasar hipotesis sebagai instrumen pengukuran WTP petani terhadap kemungkinan perubahan kebijakan maupun kenaikan harga pupuk bersubsidi.

Memperoleh Nilai WTP

Pengukuran WTP responden menggunakan metode *payment card*, dengan menyajikan opsi pilihan harga kepada petani yang menentukan batas maksimum WTP mereka apabila terjadi perubahan kebijakan subsidi pupuk. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rachmah et al., 2023) bahwa metode ini mampu menghasilkan data yang cukup akurat, terutama komoditas yang telah memiliki harga acuan seperti pupuk bersubsidi dengan HET yang ditetapkan pemerintah, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi WTP serta menghitung nilai rata-ratanya dalam satuan rupiah.

Menghitung Rataan WTP

Setelah survei selesai nilai WTP responden diperoleh, selanjutnya menghitung rata-rata WTP untuk mengetahui besaran rupiah yang bersedia dibayarkan petani sebagai bahan evaluasi kebijakan subsidi pupuk. Perhitungan ini dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\boldsymbol{EWTP_i \sum_{i=0}^{n} W_i \ (Pf_i)}$$

Keterangan:

$EWTP_i$ = Dugaan nilai rataan WTP (Rp)
W_i = Nilai WTP ke-I (Rp)
Pf_i = Frekuensi relative kelas WTP ke-i
n = Jumlah kelas WTP
i = Responden ke-i (i=1, 2, 3..., n)

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi WTP Terhadap Pupuk Bersubsidi

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linear berganda untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel yang diduga memengaruhi WTP petani. Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan dengan rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 DX_5 + \beta_6 DX_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	*Willingness to Pay* pupuk bersubsidi (Rupiah)
A	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien dari masing-masing variabel bebas
X_1	=	Persepsi petani (Jumlah skor persepsi responden)
X_2	=	Luas lahan (Hektar)
X_3	=	Pendapatan usahatani (Rupiah)
X_4	=	Pengalaman usahatani (Tahun)
DX_5	=	Status kepemilikan lahan (1: milik sendiri, 0: Sewa/Bagi hasil)
DX_6	=	Tingkat kesulitan akses pupuk bersubsidi (1: mudah, 0: sulit)
€	=	Error

Uji normalitas data

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi berdistribusi normal dengan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Jika signifikansi ≤ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, sedangkan ≥ 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas

Uji ini bertujuan menilai apakah antar variabel independen saling berkorelasi dalam model regresi. Indikatornya adalah nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas jika tolerance ≥ 0,01 dan VIF ≤ 10, sedangkan *tolerance* < 0,01 dan *VIF* > 10 menunjukkan adanya multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan mengetahui ada tidaknya perbedaan varians residual dalam model regresi. Model bebas heteroskedastisitas jika signifikansi > 0,05, sedangkan < 0,05 menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Uji Statistik

Koefisien determinasi (R^2)

Uji ini untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) berada pada rentang nol hingga satu. Hipotesis diuji pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05).

Uji stastik F

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa jika nilai F hitung > F tabel atau p-*value* < 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

$$F \frac{(R^2/k)}{((1-R^2)/(n-k-1))}$$

Keterangan:
R^2 = Koefisien determinasi
k = Jumlah variabel independen
n = Jumlah sampel

Uji statistik T

Uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$$t\ hitung = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:
t hitung = Nilai T hitung
r = Korelasi
n = Jumlah Sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Persepsi Petani Padi Terhadap Pupuk Bersubsidi

Hasil analisis persepsi petani padi terhadap pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan empat variabel, disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Interprestasi Nilai Persepsi Petani Terhadap Pupuk Bersubsidi

	Pernyataan	Rata-rata Skor	Kategori
	A. Kualitas Pupuk Bersubsidi		
1	Kualitas pupuk bersubsidi yang diterima dalam kondisi baik	4.17	Baik
2	Pupuk bersubsidi memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi	4.10	Baik
3	Kemasan pupuk bersubsidi dalam kondisi tidak rusak/robek saat diterima	4.12	Baik
4	Kualitas pupuk bersubsidi tidak berbeda dengan pupuk non-subsidi	2.27	Buruk
5	Pupuk bersubsidi tidak mengandung bahan palsu atau campuran	4.04	Baik
6	Pupuk bersubsidi yang diterima memiliki label dan merek yang jelas	4.07	Baik
	Rata-rata Skor	**3,79**	**Baik**
	B. Ketersediaan Pupuk Bersubsidi		
7	Pupuk bersubsidi tersedia di kios resmi saat musim tanam	3.82	Baik
8	Jumlah pupuk bersubsidi yang diterima sesuai dengan kebutuhan lahan saya	3.90	Baik
9	Tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah responden	3.83	Baik
10	Stok pupuk bersubsidi di kios selalu ada	3.95	Baik
11	Ketersediaan pupuk bersubsidi dapat diandalkan setiap kali melakukan pemupukan	3.93	Baik
12	Saya dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan mudah tanpa terhambat oleh kehabisan stok	3.88	Baik
	Rata-rata Skor	**3,89**	**Baik**

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

	Pernyataan	Rata-rata Skor	Kategori
	C. Distribusi/Penyaluran Pupuk Bersubsidi		
14	Lokasi kios pupuk bersubsidi mudah dijangkau dari lokasi lahan saya	4.07	Baik
15	Waktu distribusi pupuk bersubsidi tepat waktu sesuai dengan jadwal tanam	4.08	Baik
16	Proses pengambilan pupuk bersubsidi berjalan lancar tanpa hambatan	3.89	Baik
17	Mekanisme/sistem verifikasi yang digunakan kartu tani memudahkan saya dalam mendapatkan pupuk bersubsidi	3.85	Baik
18	Prosedur administrasi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi mudah dipahami	3.93	Baik
19	Pelayanan petugas dalam penyaluran pupuk bersubsidi memuaskan	3.94	Baik
20	Saya mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi tanpa ada indikasi penyimpangan	4.08	Baik
21	Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 Tepat (jenis, jumlah, waktu, tempat, mutu, harga)	3.82	Baik
	Rata-rata Skor	**3,96**	**Baik**
	D. Ketepatan/Kewajaran Harga Pupuk Bersubsidi		
22	Harga pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah	3.67	Baik
23	Tidak ada pungutan tambahan saat membeli pupuk bersubsidi	4.00	Baik
24	Harga pupuk bersubsidi transparan dan jelas	3.92	Baik
25	Saya mengetahui dengan jelas berapa HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah	3.46	Baik
26	Harga pupuk bersubsidi saat ini masih terjangkau untuk saya	3.88	Baik
27	Harga pupuk bersubsidi jauh lebih murah dibandingkan pupuk non-subsidi	4.23	Sangat baik
	Rata-rata Skor	**3,89**	**Baik**
	Rata-rata Skor Keseluruhan	**3,88**	**Baik**

Sumber: *Data Primer Diolah, 2026*

Kualitas pupuk memperoleh skor 3,79, yang mencerminkan bahwa sebagian besar petani mengakui kondisi fisik pupuk bersubsidi yang mereka terima cukup baik, tidak mengandung bahan palsu, memiliki label dan merek yang jelas, serta kemasan yang diterima dalam keadaan utuh. Penerapan Kartu Tani turut berperan dalam menekan peredaran pupuk palsu, karena pupuk hanya dapat ditebus melalui kios resmi yang terverifikasi sistem, sehingga membangun kepercayaan petani terhadap keaslian produk yang mereka gunakan. Sesuai dengan temuan (Sinaga, 2022) bahwa distribusi berbasis Kartu Tani mampu meningkatkan efektivitas penyaluran karena hanya petani terdaftar yang dapat melakukan penebusan.

Salah satu indikator kualitas menunjukkan nilai jauh di bawah rata-rata, yaitu kesetaraan kualitas pupuk bersubsidi dan non-subsidi dengan skor 2,27 (kategori buruk). Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan mutu yang dirasakan petani. Sebagian petani cenderung memilih pupuk non-subsidi meskipun lebih mahal karena dianggap lebih mendukung pertumbuhan padi, terutama pada fase kritis. Namun, pilihan ini meningkatkan biaya produksi dan berpotensi memengaruhi pengelolaan luas lahan. Di sisi lain, pupuk bersubsidi tetap membantu menekan biaya meskipun kualitasnya dinilai lebih rendah. Selain itu,

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

masih terdapat kendala distribusi seperti pupuk menggumpal dan kemasan bocor yang mengurangi efektivitas pemupukan dan berpotensi menurunkan produktivitas padi.

Ketersediaan pupuk memperoleh skor 3,89, yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani yang aktif dalam kelompok tani dan terdaftar dalam e-RDKK merasakan stok pupuk bersubsidi di kios selalu tersedia dan dapat diandalkan setiap kali musim pemupukan tiba. Petani menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi kelangkaan maupun keterbatasan kuota yang berarti, sehingga penilaian positif ini terbentuk dari perbandingan dengan kondisi sebelum penerapan sistem digital yang dinilai jauh lebih buruk. Namun demikian, terdapat permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian, yakni persepsi positif tersebut hanya dirasakan oleh petani yang telah terdaftar secara administratif dalam sistem. Petani yang tidak memiliki telepon genggam kerap mengalami keterlambatan dalam memperoleh informasi jadwal pengambilan pupuk, sehingga berisiko kehilangan akses terhadap pupuk bersubsidi meskipun secara administratif telah terdaftar. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan digital yang nyata di lapangan dan membuktikan bahwa ketersediaan pupuk secara fisik di kios belum menjamin seluruh petani dapat mengaksesnya secara merata dan tepat waktu.

Distribusi/penyaluran pupuk memperoleh skor tertinggi sebesar 3,96, yang mencerminkan bahwa petani merasakan perubahan positif dalam ketertiban dan kemudahan proses penebusan pupuk sejak diterapkannya sistem Kartu Tani. Prosedur penebusan yang lebih sederhana, kedekatan hubungan antara petani dan petugas kios, serta minimnya praktik kecurangan dalam distribusi menjadi dasar terbentuknya penilaian tertinggi pada variabel ini. Sejalan dengan temuan (Gunawan & Pasaribu, 2020) program Kartu Tani menerapkan sistem monitoring yang efektif dalam mendukung distribusi yang lebih terstruktur sehingga meningkatkan efisiensi dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, keterlambatan distribusi masih memaksa petani membeli pupuk non-subsidi dengan harga di atas HET, sehingga meningkatkan biaya produksi pada masa tanam kritis. Petani yang jauh dari kios juga harus menanggung biaya angkut tambahan. Kondisi ini membuktikan bahwa prinsip 6T pada aspek ketepatan tempat belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana dikuatkan oleh (Adiraputra et al., 2021) yang menyatakan bahwa penyimpangan distribusi dan harga di atas HET masih dapat terjadi meskipun sistem pengawasan telah diperketat.

Ketepatan/kewajaran harga pupuk memperoleh skor 3,89, di mana persepsi positif petani terbentuk terutama dari pengalaman langsung mereka saat menghadapi tingginya harga pupuk non-subsidi ketika distribusi mengalami keterlambatan. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan petani bahwa subsidi harga yang diberikan pemerintah memberikan manfaat nyata dalam menekan biaya produksi, khususnya di tengah lonjakan biaya pertanian yang semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan (Rigi et al., 2019) yang menegaskan bahwa perbedaan harga yang signifikan antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi menjadi faktor pendorong utama petani dalam mengakses pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas. Namun, pengalaman petani yang membayar pupuk di atas HET akibat ongkos kirim perlu diperhatikan. Seringnya petani membayar harga di atas HET juga mencerminkan penyimpangan yang melemahkan perlindungan subsidi, terutama karena keterbatasan finansial petani membuat tambahan biaya sekecil apa pun tetap menekan pendapatan usaha tani.

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

Analisis Kesediaan Membayar Petani Terhadap Pupuk Bersubsidi
Pasar hipotesis

Pasar hipotesis dalam penelitian ini dibangun berdasarkan potensi kebijakan penurunan anggaran subsidi pupuk yang mendorong penyesuaian HET melalui kenaikan harga. Dalam skenario ini, petani dijamin kualitas pupuk, ketersediaan stok dan distribusi tepat waktu agar nilai WTP mencerminkan kesediaan membayar yang sesungguhnya. Hasil analisis WTP diharapkan menjadi bahan evaluasi apakah HET telah sesuai dengan kemampuan finansial petani serta pertimbangan kebijakan harga yang tepat tanpa menambah beban produksi di Kota Bengkulu. Setelah skenario disampaikan, diperoleh data petani yang bersedia dan tidak bersedia membayar di Kecamatan Singaran Pati dan Muara Bangkahulu.

Tabel 5. Kesediaan Petani Untuk Membayar (WTP) Pupuk Besubsidi

Kesediaan Membayar	Responden (Orang)	Persentase %
Bersedia	65	78,31
Tidak Bersedia	18	21,69
Total	83	100

Sumber: *Data primer diolah 2026*

Sebanyak 65 petani responden (78,31%) menyatakan kesediaan membayar pupuk bersubsidi apabila terjadi kebijakan kenaikan harga. Kesediaan tersebut didorong oleh persepsi positif petani terhadap program pupuk bersubsidi yang tercermin dari rata-rata skor persepsi sebesar 3,88 pada kategori baik, mencakup penilaian positif terhadap kualitas, ketersediaan, distribusi, dan kewajaran harga. Petani yang bersedia membayar juga merasakan langsung besarnya selisih harga antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi, khususnya saat terjadi kelangkaan dan keterlambatan distribusi, sehingga meskipun harga naik, pupuk bersubsidi tetap dinilai jauh lebih terjangkau dan mampu menekan biaya produksi padi. Selain itu, skenario pasar hipotesis yang menjamin kualitas pupuk, kecukupan stok, dan ketepatan distribusi secara langsung menjawab keluhan utama petani di lapangan, sehingga mereka menilai manfaat yang diterima sepadan dengan penyesuaian harga yang dibayarkan.

Sebanyak 18 petani responden (21,69%) menyatakan ketidaksediaan membayar pupuk bersubsidi apabila terjadi kebijakan kenaikan harga. Sikap tersebut mencerminkan kekecewaan petani yang pernah mengalami kelangkaan pupuk pada musim tanam, keterlambatan pasokan ke kios resmi, serta ketidaksesuaian antara jumlah pupuk yang diterima dengan kebutuhan yang tercantum dalam RDKK. Pengalaman tersebut membentuk persepsi bahwa kenaikan harga yang disertai janji perbaikan distribusi belum tentu menjamin perubahan nyata di lapangan. Petani yang tidak bersedia membayar sebagian besar merupakan petani kecil yang telah menanggung beban biaya produksi tinggi dengan kemampuan finansial yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menerima tambahan beban berupa kenaikan harga pupuk bersubsidi.

Memperoleh nilai WTP

Pengukuran nilai WTP dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Payment Card*. Di lapangan, petani padi hanya menggunakan dua jenis pupuk bersubsidi, yaitu Urea dengan HET Rp2.250/kg dan NPK sebesar Rp2.300/kg. Kenaikan harga disusun secara bertahap dengan interval Rp250

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

agar perubahan harga terasa realistis dan memudahkan petani dalam menentukan batas kesediaan membayar sesuai kemampuan ekonomi mereka. Nilai tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp5.000/kg untuk Urea dan Rp5.050/kg untuk NPK, sengaja dirancang mendekati harga pupuk non-subsidi namun tetap dalam batas kemampuan petani, agar pilihan yang disajikan terasa nyata dan mudah dipahami oleh responden (Johnston, 2017). Penetapan rentang harga ini juga bertujuan menghindari jawaban yang tidak realistis akibat selisih harga yang terlalu jauh dari HET, sekaligus menyesuaikan dengan skenario kebijakan harga yang berlaku, sehingga tetap relevan dengan kondisi finansial petani padi di Kota Bengkulu (Usaha et al., 2019). Setiap responden diberikan kartu yang memuat pilihan harga Urea mulai dari Rp2.250 sebagai HET saat ini, meningkat bertahap hingga Rp5.000, sedangkan untuk NPK dimulai dari Rp2.550 hingga Rp5.050. Responden juga diberikan opsi untuk memilih harga di atas Rp5.000.

Menghitung Rataan WTP

Setelah nilai WTP petani responden diketahui, maka dilakukan perhitungan data distribusi WTP untuk menggambarkan kemampuan membayar petani secara keseluruhan, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi besaran subsidi pupuk yang tepat sasaran.

Tabel 6. Distribusi Perhitungan Nilai Rataan WTP

	Nilai WTP/Kg	Frekuensi (Orang)	Mean WTP
Pupuk Urea Bersubsidi	Rp2.250 (HET saat ini)	18	Rp 448,-
	Rp2.500	48	Rp 1.446,-
	Rp2.750	1	Rp 33,-
	Rp3.000	4	Rp 145,-
	Rp3.250	1	Rp 39,-
	Rp3.500	3	Rp 127,-
	Rp3.750	1	Rp 45,-
	Rp4.000	1	Rp 48,-
	Rp5.000	6	Rp 361,-
	Total	**83**	**Rp 2.732,-**
Pupuk NPK Bersubsidi	Rp2.300 (HET saat ini)	18	Rp 499,-
	Rp2.550	48	Rp 1.475,-
	Rp2.800	1	Rp 34,-
	Rp3.050	4	Rp 147,-
	Rp3.300	1	Rp 40,-
	Rp3.550	3	Rp 128,-
	Rp3.800	1	Rp 46,-
	Rp4.050	1	Rp 49,-
	Rp5.000	6	Rp 361,-
	Total	**83**	**Rp 2.778,-**

Sumber: *Data primer diolah 2026*

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

Nilai rata-rata WTP untuk pupuk Urea Rp2.732/kg setara dengan 21,4%, sementara WTP untuk pupuk NPK Rp2.778/kg setara dengan 21%. Kedua nilai tersebut menunjukkan kesediaan membayar di atas HET, besaran peningkatannya masih tergolong kecil dan mencerminkan realitas kondisi ekonomi serta pengalaman lapangan petani di Kota Bengkulu. Sebanyak 58% dari 48 petani secara individu memilih harga Rp2.500/kg Urea dan Rp2.550/kg NPK, yakni hanya Rp250 di atas HET saat ini, yang menjadi pilihan paling dominan dalam membentuk nilai rata-rata WTP. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas petani hanya bersedia menerima kenaikan harga dalam jumlah kecil, yang sebagian besar merupakan petani berlahan sempit. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Zainuddin et al., 2022) bahwa kesediaan membayar petani sangat. dipengaruhi oleh tingkat pendapatan mereka, mengingat proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk pembelian pupuk setiap musim tanam sangat besar, sehingga sensitivitas mereka terhadap perubahan harga pun sangat tinggi dan setiap kenaikan sekecil apapun sudah terasa memberatkan.

Sebanyak 18 petani atau 22% dari total responden menyatakan tidak bersedia membayar pupuk di atas HET yang berlaku saat ini. Kelompok petani ini menilai bahwa harga pupuk bersubsidi yang ada sudah memberatkan, mengingat biaya pembelian pupuk menyerap proporsi yang sangat besar dari total biaya produksi usahatani mereka. Kondisi ini sesuai pada penelitian (Amrin et al., 2023) kenaikan harga pupuk akan langsung memperbesar beban biaya produksi, sementara pendapatan dari hasil panen tidak meningkat secara sebanding, sehingga margin keuntungan usahatani semakin menyempit. Dengan demikian, petani dalam kelompok ini tidak memiliki ruang finansial untuk menerima kenaikan harga pupuk. Jika HET tetap dinaikkan, petani skala kecil di Kota Bengkulu akan semakin kesulitan menutup biaya produksi dari hasil panen, sehingga mengancam keberlangsungan usaha pertanian mereka.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi WTP Terhadap Pupuk Bersubsidi

Uji normalitas data

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, model regresi dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Uji multikolineritas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* antara 0,754 hingga 0,945 yang berada di atas 0,10, serta nilai VIF berkisar 1,058 hingga 1,326 yang masih di bawah 10, sehingga model dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Antar variabel independen tidak memiliki korelasi yang kuat dan masing-masing memberikan informasi yang berbeda, sehingga pengaruh tiap variabel terhadap WTP dapat dianalisis secara terpisah dengan hasil yang lebih akurat dan mudah diinterpretasikan.

Uji heteroskedastisitas

Penelitian ini menguji heteroskedastisitas menggunakan metode *Rank Spearman* yang dipilih sebagai uji non-parametrik karena sesuai untuk data campuran antara variabel kontinu dan dummy (Ghozali, 2018). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi antara 0,075 hingga 0,399 > 0,05, sehingga model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

Uji Statistik

Koefisien determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,246 menunjukkan bahwa variabel dalam model mampu menjelaskan 24,6% variasi WTP, sedangkan 75,4% sebagian lainnya ditentukan oleh variabel di luar model. Menurut (Ghozali, 2016) Semakin rendah nilai koefisien determinasi, maka semakin terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kondisi ini terjadi karena keputusan petani dalam membayar pupuk tidak hanya dipengaruhi faktor terukur, tetapi juga faktor subjektif seperti pengalaman, kebiasaan, dan kondisi ekonomi yang dinamis. Hasil uji uji-F dengan signifikansi 0,001 < 0,05, yang menandakan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap WTP petani di Kota Bengkulu. Secara hasil uji-t dari enam variabel yang di analisis terdapat empat variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu persepsi petani, luas lahan, pendapatan, dan status kepemilikan lahan, dari empat variabel ini yang mencerminkan kondisi nyata bahwa keputusan menggunakan enam variabel ini masih tetap relevan dan mampu menjelaskan perilaku WTP petani padi di Kota Bengkulu.

Uji statistik F

Hasil uji F hitung sebesar 4,140 dengan signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap WTP. Oleh karena itu, model regresi dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis dan interpretasi berikutnya.

Uji stastik T

Berdasarkan hasiil uji T pada persamaan regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 8, diperoleh hasil uji T sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil analisis Uji T

Variabel	B	Std.Error	Beta	t	Sig
Constant	-9139,712	4552,354		-2,008	,048
Persepsi (X1)	-683,424	332,885	-,234	-2,053	,044*
Luas Lahan (X2)	450,997	185,599	,265	2,430	,017*
Pendapatan (X3)	905,567	272,366	,391	3,325	,001*
Lama Bertani (X4)	-,415	7,777	-,005	-,053	,958
Status Kepemilikan Lahan (DX5)	-654,798	201,321	-,391	-3,253	,002*
Akses Pupuk Bersubsidi (DX6)	-279,616	234,696	-,136	-1,191	,237

*Keterangan: * signifikan pada taraf 5%;*

Sumber: *Data Primer 2026*

Diperoleh persamaan regresi hasil analisis regresi linear berganda yang di sajikan pada Tabel 8 di atas adalah.

WTP = -2.188,599 + 58,919 Persepsi - 745,746 Luas Lahan - 9,955E-5 Pendapatan - 4,714 Lama Bertani + 503,205 Status Lahan + 203,286 Akses Pupuk + εi

Persepsi Petani

Persepsi petani memiliki nilai signifikansi 0,044 < 0,05, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap WTP. Rata-rata skor persepsi sebesar 3,88 dalam kategori baik mencerminkan penilaian positif terhadap kualitas, ketersediaan, distribusi, dan kewajaran harga pupuk bersubsidi. Hasil CVM menunjukkan sekitar 58% petani hanya bersedia membayar tambahan Rp250 di atas HET, menandakan harga saat ini dianggap sesuai kemampuan ekonomi.

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi petani, semakin kecil dorongan untuk membayar lebih tinggi karena kebijakan dinilai sudah memadai. Penelitian (Gunawan & Pasaribu, 2020) juga menemukan bahwa persepsi positif terhadap kemudahan akses pupuk melalui kartu tani justru memperkuat keinginan petani untuk mempertahankan harga subsidi. Selain itu, (Aryawan et al., 2024) menegaskan bahwa persepsi terhadap ketersediaan pupuk dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, dan petani yang menilai program subsidi telah berjalan optimal cenderung tidak terdorong untuk membayar di atas harga yang ditetapkan pemerintah.

Luas Lahan

Luas lahan memiliki nilai signifikansi 0,017 < 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap WTP. Semakin luas lahan, semakin tinggi kesediaan petani membayar di atas HET (Rachmah et al., 2023). Rata-rata luas lahan petani di wilayah Kecamatan Singaran Pati dan Muara Bangkahulu sebesar 0,8 ha, yang termasuk kategori sempit, sehingga sebagian besar petani berada pada kondisi keuangan yang sensitif terhadap kenaikan harga. Hal ini karena lahan luas membutuhkan input lebih besar untuk menjaga produktivitas. Selain itu, (Zainuddin et al., 2022) menemukan bahwa petani kecil sering pemupukan dilakukan tidak tepat waktu dan sesuai dosis karena keterbatasan biaya, yang berdampak pada penurunan produksi. Berdasarkan hasil CVM, sebagian besar petani bersedia membayar pada harga terendah, yaitu Rp2.500/kg untuk pupuk Urea dan Rp2.550/kg untuk pupuk NPK. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya pupuk menjadi beban yang cukup besar bagi pendapatan petani, sehingga kenaikan harga, meskipun kecil, tetap dirasakan berat, terutama bagi petani dengan lahan sempit.

Pendapatan Usahatani

Pendapatan memiliki nilai signifikansi 0,001 < 0,05, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap WTP petani. Rata-rata pendapatan petani sebesar Rp15.050.759/2 kali musim tanam, menunjukkan kondisi ekonomi menengah dan memungkinkan sebagian petani membayar pupuk di atas HET, semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan membayar. Hasil CVM menunjukkan rata-rata WTP sebesar Rp2.732/kg (Urea) dan Rp2.778/kg (NPK), atau sekitar Rp250–Rp482 di atas HET, yang mencerminkan keterbatasan ekonomi petani. Sekitar 21,69% petani tidak bersedia membayar di atas HET karena keterbatasan tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh penurunan produksi padi di Kota Bengkulu dari 4.808 ton (2023) menjadi 3.694 ton (2024) yang berdampak pada menurunnya pendapatan dan kemampuan membeli pupuk dengan harga lebih tinggi. Hasil ini serupa dikemukakan (Oktaviani et al., 2025) yang menyebutkan bahwa pendapatan menjadi faktor penting dalam menentukan WTP, di mana petani dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih bersedia membayar melebihi tarif yang ditetapkan. Selain itu, (Mulyani & Hidayat, 2025) juga menegaskan bahwa kondisi keuangan petani menjadi penentu utama dalam besaran WTP karena peningkatan pendapatan memperluas kemampuan dalam menghadapi kenaikan harga input.

Lama Bertani

Lama bertani memiliki nilai signifikansi 0,958 > 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan WTP petani terhadap pupuk bersubsidi. Rata-rata pengalaman bertani 30 tahun menunjukkan petani berpengalaman. Namun hal ini mencerminkan bahwa pengalaman bertani tidak secara langsung memengaruhi

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

keputusan petani dalam membayar pupuk di atas HET. Hasil penelitian (Oktaviani et al., 2025) juga yang menyatakan bahwa pengalaman bertani tidak berpengaruh nyata terhadap WTP karena tidak berkaitan langsung dengan keputusan pembayaran. Bahkan, petani yang lebih berpengalaman cenderung kurang menerima pemahaman tentang pentingnya WTP, karena keputusan lebih dipengaruhi kondisi ekonomi. Meskipun pengalaman meningkatkan pemahaman pemupukan, hal tersebut tidak diikuti peningkatan kesediaan membayar jika keuangan tidak mendukung. Hasil CVM juga menunjukkan sebagian besar responden, tanpa memandang lama bertani, memilih Rp2.500/kg sebagai batas kemampuan membayar pupuk.

Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan memiliki nilai signifikansi 0,002 < 0,05, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap WTP. Berdasarkan data primer, mayoritas petani berstatus lahan milik sendiri. Namun, variabel ini berpengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa petani pemilik cenderung lebih selektif dalam membayar di atas HET karena lebih mempertimbangkan efisiensi biaya produksi. Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan banyak petani berstatus penggarap atau bagi hasil yang harus menanggung biaya input sekaligus sewa atau pembagian hasil, sehingga beban biaya meningkat dan kemampuan menerima kenaikan harga pupuk menjadi terbatas. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian (Pasaribu, M., & Istriningsih, 2020) status kepemilikan lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani, di mana pemilik lahan memiliki pendapatan lebih tinggi karena tidak menanggung biaya sewa, sehingga lebih mampu membiayai input produksi. Selain itu, hasil ini didukung oleh temuan bahwa sekitar 21,69% petani tidak bersedia membayar di atas HET, yang umumnya berasal dari petani berlahan sempit dengan status penggarap atau bagi hasil dan memiliki beban biaya produksi lebih besar.

Akses Pupuk Bersubsidi

Akses pupuk memiliki nilai signifikansi 0,237 > 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap WTP. Skor distribusi sebesar 3,96 menunjukkan akses melalui sistem Kartu Tani tergolong baik, namun kemudahan tersebut tidak secara langsung meningkatkan kesediaan petani untuk membayar lebih tinggi. Sesuai pada penelitian (Gunawan & Pasaribu, 2020) bahwa kondisi ini menunjukkan keputusan petani dalam menentukan WTP lebih dipengaruhi oleh kemampuan finansial daripada faktor kemudahan akses. Meskipun distribusi pupuk dinilai semakin baik, keterbatasan ekonomi tetap menjadi alasan utama yang membatasi kesediaan petani untuk membayar di atas harga yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, petani padi di Kecamatan Singaran Pati dan Muara Bangkahulu memiliki persepsi yang baik terhadap pupuk bersubsidi dengan rata-rata skor 3,88 dari aspek kualitas, ketersediaan, distribusi, serta kewajaran harga. Kedua, WTP pupuk Urea sebesar 21,4% dari HET Rp2.250/kg menjadi Rp2.732/kg, dan NPK sekitar 21% dari Rp2.300/kg menjadi Rp2.778/kg. Ketiga, faktor yang berpengaruh signifikan terhadap WTP adalah persepsi, luas lahan, pendapatan, dan status kepemilikan lahan, sedangkan lama bertani dan akses pupuk tidak signifikan.

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

Saran meliputi penyesuaian HET dengan mengacu pada rata-rata WTP petani dengan penerapan subsidi secara bertahap yang diprioritaskan bagi petani berlahan sempit, peningkatan pendapatan usahatani melalui penyuluhan dan kebijakan stabilisasi harga pupuk bersubsidi serta peningkatan pengawasan distribusi pupuk dan sosialisasi kebijakan HET.

DAFTAR PUSTAKA

Aberth, W. A. V. P. (2024). *Subsidi Pupuk Capai Rp44,16 Triliun di 2025, Komitmen Ketahanan Pangan Indonesia*. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/subsidi-pupuk-capai-rp4416-triliun-di-2025-komitmen-ketahanan-pangan-indonesia-sLNCW

Adiraputra, P., Supyandi, D., & Java, W. (2021). *The Effectiveness of Fertilizer Subsidy : How the Impact to the Production*. *15*(2), 345–356.

Amrin, S. N., Hadi, S., Riau, U., & Pertanian, E. (2023). *Dampak kenaikan harga pupuk terhadap penggunaannya pada usahatani cabai keriting di kota pekanbaru*. *105*, 4–11.

Aryawan, F., Zainuddin, A., Soejono, D., & Zahrosa, D. B. (2024). Determinan Persepsi Petani Padi Terhadap Ketersediaan Pupuk Bersubsidi: Sebuah Analisis Regresi Logistik Ordinal. *Agrimics Journal*, *1*(2), 81–97.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2025). *Produksi Padi Provinsi Bengkulu 2023–2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.

Bengkulu Today. (2025). *Polda Bengkulu Amankan 18,2 Ton Pupuk Tanpa Izin*. Bengkulu Today.Com. https://www.bengkulutoday.com/polda-bengkulu-amankan-182-ton-pupuk-tanpa-izin

Deo Jeremy Sinaga, Joko Sutrisno, R. A. Q. (2022). *ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN KARTU TANI DI KABUPATEN KARANGANYAR*. *10*(2), 59–72.

Firmansyah, R. S. (2025). *Selewengkan 90 Ton Pupuk Subsidi, 2 Pemilik Toko di Bengkulu Jadi Tersangka*. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2026/03/03/054606878/selewengkan-90-ton-pupuk-subsidi-2-pemilik-toko-di-bengkulu-jadi-tersangka

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. https://www.researchgate.net/publication/301199668_Aplikasi_Analisis_Multivariete_SPSS_23

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan IBM SPSS 25. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Gunawan, E., & Pasaribu, S. (2020). Persepsi petani dalam implementasi program kartu tani untuk mendukung distribusi pupuk bersubsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *28*(2), 131–144.

Halim, I. A., & Adab, M. P. P. (2023). *KARTU TANI DAN PUPUK BERSUBSIDI Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros*. Penerbit Adab.

Jamil, A., Pascasarjana, S., Pembangunan, S., & Hasanuddin, U. (2022). *PUPUK BERSUBSIDI UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN Inclusiveness of Policies and The Role of Actors in Subsidied Fertilizer Management to Achieve Food Security*. *20*(2), 161–172.

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153

Johnston, R. J., Boyle, K. J., Adamowicz, W., Bennett, J., Brouwer, R., Cameron, T. A., ... & Vossler, C. A. (2017). Contemporary guidance for stated preference studies. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, *4 (2)*, 319–405. https://doi.org/https://doi.org/10.1086/691697

Kementerian Pertanian. (2024). *Untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah, Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tepat Waktu di 1 Januari 2025*. Kementerian Pertanian Republik Indonesisa. https://psp.pertanian.go.id/berita/untuk-pertama-kalinya-dalam-sejarah-penyaluran-pupuk-bersubsidi-tepat-waktu-di-1-januari-2025

Mulyani, E., & Hidayat, N. K. (2025). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Willingness to Pay Peternak atas Kenaikan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTS / K)*. *4*(2), 66–76.

Oktaviani, A. W., Laily, D. W., Hafi, N., & Fitriana, I. (2025). *Kesediaan Membayar (Willingness to Pay) Petani Padi pada Layanan Irigasi di Desa Mojomanis , Kecamatan Kwadungan , Kabupaten Ngawi Willingness to Pay Rice Farmers on Irrigation Services in Mojomanis Village , Kwadungan District , Ngawi Regency*. *11*, 332–340.

Ombudsman RI. (2024). *Ombudsman RI Pantau Distribusi Pupuk Bersubsidi di Bengkulu*. Ombudsman RI. https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-pantau-distribusi-pupuk-bersubsidi-di-bengkulu

Pasaribu, M., & Istriningsih, I. (2020). *PENGARUH STATUS KEPEMILIKAN LAHAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI BERLAHAN SEMPIT DI KABUPATEN INDRAMAYU DAN PURWAKARTA*. 187–198.

Rachmah, M. A., Darwanto, D. H., & Mulyo, J. H. (2023). ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DAN KESEDIAAN PETANI UNTUK MEMBAYAR (WTP) PUPUK BIO-SLURRY DI JAWA TENGAH. *Jurnal Pertanian Agros*, *25*(1), 574–583.

Rigi, N., Raesi, S., & Azhari, R. (2019). *Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*. *1*(7), 75–83.

Rozci, F. (2024). *Subsidi Pupuk : Kebijakan , Implementasi , dan Peningkatan*. *1*, 12–21.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kunatitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Usaha, P., Padi, T., Price, R., Rachman, B., Agustian, A., Syaifudin, A., Tentara, J., No, P., & Barat, J. (2019). *Impacts of Rice Ceiling Price Policy on Paddy Farming Profitability ,*. *17*(1), 59–77.

Zainuddin, A., Rondhi, M., Setyawati, I. K., Rahman, R. Y., & Magfiroh, I. S. (2022). Kesediaan membayar dari petani skala kecil terhadap pupuk bersubsidi: Studi kasus di Kabupaten Jember, Jawa Timur. *Jurnal Agro Ekonomi*, *40*(2), 123–134.

DOI: https://doi.org/10.30596/jasc.v10i2.30153